

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang menganut azas desentralisasi dalam pemerintahan, yaitu dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Desentralisasi adalah suatu proses penyerahan sebagian wewenang dan tanggung jawab dari urusan yang semula adalah urusan pemerintah pusat kepada badan-badan atau lembaga-lembaga pemerintah daerah. Tujuannya agar urusan-urusan dapat beralih kepada daerah dan menjadi wewenang serta tanggung jawab pemerintah daerah. Desentralisasi dibedakan atas tiga bagian:

- a. Desentralisasi politik, yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat yang meliputi hak mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di daerah yang dipilih oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu.
- b. Desentralisasi fungsional, yaitu pemberian hak kepada golongan-golongan tertentu untuk mengurus segolongan kepentingan tertentu dalam masyarakat baik terikat maupun tidak pada suatu daerah tertentu, seperti mengurus irigasi bagi petani.
- c. Desentralisasi kebudayaan, yaitu pemberian hak kepada golongan-golongan minoritas dalam masyarakat untuk menyelenggarakan kebudayaan sendiri, seperti ritual kebudayaan.

Menurut Suparmoko, (2002:61), “Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah telah dibuka saluran baru bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam memberikan pelayanan umum kepada masyarakat untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Kewenangan ini pada dasarnya merupakan upaya untuk membatasi kewenangan pemerintah dan provinsi hanya diperkenalkan menyelenggarakan kegiatan otonom sebatas ditetapkan.

Melalui otonomi diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu aktif mengatur daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu memainkan peranannya dalam membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan identifikasi potensi sumber-sumber pendapatannya dan mampu menetapkan belanja daerah secara ekonomi yang wajar, efektif, dan efisien termasuk kemampuan perangkat daerah meningkatkan kinerjanya, mempertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat maupun kepada publik/masyarakat.

Demi kelacaran semua kegiatan pemerintah daerah baik kegiatan rutin maupun pembangunan di segala bidang, maka konsekuensinya pemerinah daerah harus mampu menyediakan dana yang cukup besar unuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut. Oleh sebab itu sumber-sumber penerimaan perlu ditingkatkan terutama sumber Pendapatan Asli Daerah yang merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari

besarnya kontribusi yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan Negara disamping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah juga sisa anggaran tahun sebelumnya yang dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Keseluruhan bagian penerimaan tersebut setiap tahun tercermin dalam APBD, meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai APBD.

Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan secara maksimal, namun tentu saja dalam koridor perundang-undangan yang berlaku khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui pendapatan asli daerah. Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah itu sendiri. Pendapatan Asli Daerah dapat dipandang salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur tingkat ketergantungan suatu daerah kepada pemerintah daerah (insukindro, dkk. 1994),.

Menurut undang-undang No. 33 tahun 2004, pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber didalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali di daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah

daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

Badan Pendapatan daerah Kota Padang merupakan salah satu perangkat daerah Kota Padang yang disertai kewenangan sebagai pengelola pendapatan asli daerah khususnya untuk Kota Padang. Sudah menjadi kewajiban masing- masing daerah untuk dapat semaksimal mungkin menggali sumber-sumber kekayaannya yang bisa memberikan kontribusi secara terus-menerus bagi pembiayaan pembangunan di daerah dan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dalam hal Pendapatan Asli Daerah, Badan Pendapatan Daerah memegang peranan yang sangat penting dalam upaya peningkatannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Peranan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Padang dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) .”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pendapatan asli daerah yang telah diuraikan pada latar belakang diatas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah dalam penulisan ini adalah :

- a. Seberapa besar peran Badan Pendapatan Daerah dalam pengelolaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang.

1.3 Tujuan dan Manfaat Magang

1.3.1 Tujuan Magang

Adapun tujuan dilaksanakan magang ini adalah :

- a. Mengetahui dan memahami peranan Badan Pendapatan Daerah Kota padang dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

- b. Untuk mengetahui susunan organisasi serta tugas dan fungsi bidang-bidang yang ada dalam Bapenda Kota Padang.
- c. Mengetahui kendala dan masalah apa saja yang ada dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah.
- d. Dapat mengaplikasikan antara ilmu yang dimiliki dan teori yang telah diperoleh selama di bangku kuliah dengan penerapan secara nyata dalam dunia kerja secara tepat guna.
- e. Untuk meningkatkan daya saing mahasiswa didalam bekerja pada kehidupan kerja nyata.
- f. Tertarik untuk mensosialisasikan diri dengan rekan kerja dalam lingkup yang lebih luas dan berhadapan langsung dengan berbagai macam karakter dan kepribadian serta disiplin ilmu yang berbeda.
- g. Untuk memenuhi bagian syarat-syarat guna menyelesaikan studi Program Diploma III Jurusan Keuangan Negara dan Daerah Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

1.3.2 Manfaat Magang

Adapun manfaat dilaksanakan magang ini:

- a. Magang ini dapat dijadikan sebagai sumber untuk mengetahui perbandingan antara tinjauan secara teoritis dengan tinjauan emoiris.
- b. Sebagai panduan bagi mahasiswa yang belum mengetahui bagaimana Peranan Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

1.4 Tempat Pelaksanaan dan Waktu Magang

Sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi Program Diploma III Ahli Madya (A.Md) maka penulis melaksanakan magang. Pelaksanaan magang di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) di Kota Padang, pelaksanaan dalam waktu 2 bulan atau 40 hari magang yang telah menjadi ketetapan dari pihak akademik.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan Tugas Akhir ini dibagi atas lima bab dimana pada setiap bab terdiri dari lima pembahasan hal-hal sebagai berikut :

BAB I

Pendahuluan

Pada bab pertama yaitu, pendahuluan membahas tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan masalah, tempat, waktu dan kegiatan magang, manfaat magang serta sistematika penulisan dari tugas akhir.

BAB II

Landasan Teori

Bab kedua landasan teori ini akan membahas secara teoritis landasan materi mengenai pengertian pendapatan, pendapatan asli daerah, sumber-sumber pendapatan asli daerah, dan dasar hukum pendapatan asli daerah.

BAB III Gambaran Umum

Selanjutnya bab tiga ini membahas gambaran secara umum tentang Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, baik dari sejarah umum, visi dan misi serta struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

BAB IV Pembahasan

Isi bab keempat yaitu, inti dari penulisan tugas akhir ini yang membahas mengenai peranan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

BAB V Penutup

Pada bab penutup penulis memberikan kesimpulan serta saran yang bermanfaat bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang berdasarkan hasil dari tinjauan penulis selama melaksanakan magang.

